

BAB 2 UMNO, PARTAI POLITIK YANG DOMINAN DI MALAYSIA

Terdapat beberapa definisi mengenai partai politik, salah satu diantaranya adalah menurut R.H. Soltau, dimana baginya partai politik merupakan sekelompok masyarakat yang terorganisir, bertindak sebagai suatu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih maupun bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum.⁴⁷ Di Malaysia sendiri, sistem partai politiknya menganut sistem multipartai, yang berarti berdasarkan keanekaragaman dalam komposisi masyarakat, sehingga perbedaan ras, agama, atau suku bangsa lebih bersifat primordial dalam satu wadah saja.⁴⁸

Melihat hal tersebut, dapat dikatakan bahwa sebagian besar partai-partai politik di Malaysia berdasarkan komposisi ras, beberapa contohnya seperti, UMNO yang mewakili ras Melayu, MCA sebagai partai politik dari ras Cina, dan MIC yang merupakan wadah aspirasi ras India. Dalam perpolitikan Malaysia, UMNO merupakan partai yang dibentuk sejak 11 Mei 1946, dimana partai itu dapat bertahan bahkan mendominasi panggung politik di negara tersebut hingga kini, meski sempat dinyatakan sebagai organisasi yang tidak sah dan kemudian berganti nama menjadi UMNO Baru.

Akan tetapi, UMNO bukanlah organisasi politik yang pertama kali berdiri di Malaysia. Sebelum UMNO lahir, di Malaysia terdapat satu partai politik yang didirikan lebih dahulu daripada UMNO yaitu, *Parti⁴⁹ Kebangsaan Melayu Malaya* (PKMM). Partai tersebut didirikan pada bulan Oktober 1945, dan para pemimpinnya terdiri atas Mokhtaruddin Laso, Dahari Ali dan Dr. Burhanuddin Al-Helmy, sementara itu penggagasnya adalah Ahmad Boestamam.

Pada tahun 1946 Dr. Burhanuddin Al-Helmy dilantik sebagai Presiden PKMM. Tujuan dari PKMM sendiri berbeda dengan UMNO. PKMM lebih cenderung agar Malaya bergabung dengan Indonesia dalam meraih kemerdekaannya. Kemudian organisasi politik lainnya adalah ASAS 50, yang

⁴⁷ R.H. Soltau, *An Introduction to Politics*, (London : Longmans, Green & Co., 1961), hlm. 199.

⁴⁸ Disimpulkan dari Buku Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 169.

⁴⁹ *Parti* dalam Bahasa Indonesia berarti partai.

terdiri dari tokoh-tokoh sastra di Malaya seperti Asraf, Keris Mas, Tongkat Warrant dan Masuri S.N.⁵⁰ Pola perjuangan mereka melalui karya sastra dan tulisan-tulisan di media massa. ASAS 50 juga memiliki tujuan yang sama dengan PKMM, yaitu kemerdekaan tanah Melayu, kemudian bergabung dengan Indonesia di bawah konsep “Melayu Raya”.

Organisasi politik yang juga berkembang kala itu adalah Hizbul Muslimin, yang diketuai oleh Ustadz Abu Bakar Al-Baqir. Tujuan Hizbul Muslimin berbeda dengan UMNO maupun PKMM, organisasi itu bertujuan untuk menjadikan Malaya sebagai sebuah negara Islam. Dalam perkembangannya kemudian, Hizbul Muslimin di tahun 1951 menjadi sebuah partai politik yang berbasiskan ras Melayu dengan tujuan mendirikan negara Islam yang dikenal dengan nama *Parti Islam Se-Malaysia* (PAS).⁵¹

UMNO sebagai partai politik yang awal pendiriannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Malaya, khususnya bagi kepentingan politik ras Melayu dapat dikatakan berperan sangat penting dalam percaturan politik Malaysia. Untuk mengukuhkan kedudukannya, UMNO kemudian melakukan koalisi politik dengan MCA lalu MIC, dimana kemudian secara bertahap terdapat partai-partai politik yang tergabung maupun pernah tergabung dengan koalisi yang pada awalnya disebut *Parti Perikatan*, lalu dikemudian hari dikenal dengan nama BN. Peran UMNO sendiri yang dominan dalam perpolitikan Malaysia tidak terlepas dari peran para elit-elitnya pada masa itu, khususnya peran para presidennya, seperti Dato' Onn Jaafar, Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Tun Hussein Onn, hingga Mahathir Mohamad.

Berangkat dari hal tersebut, Bab II ini akan berisi mengenai UMNO sebagai partai politik yang dominan di Malaysia. Bab II ini merupakan latar belakang bagaimana UMNO melalui peran para presidennya dapat menjadi sebuah struktur politik yang dominan di negara itu. Dalam Bab ini, akan terbagi tiga sub-bab yang berisi, *pertama* terbentuknya UMNO, *kedua*, peran UMNO dalam BN, *ketiga*, peran elit-elit politik dalam UMNO. Dari tiga sub-bab itu, akan dilihat bagaimana UMNO dapat menjadi sebuah struktur politik yang dominan di

⁵⁰ Lihat buku *Malaysia Kita*, (Selangor Darul Ehsan : International Law Book Services, 2004), hlm. 80.

⁵¹ *Ibid.*

Malaysia melalui peran para presidennya dan terciptanya BN sebagai partai politik koalisi di Malaysia yang merupakan sebuah kompromi politik antara partai-partai politik di negara itu untuk menciptakan stabilitas politik dalam pemerintahannya.

2.1 Terbentuknya UMNO

Pasca Perang Dunia (PD) II, pemerintah kolonial Inggris memiliki keinginan untuk mengagas *Malayan Union* di Malaya. Pengagasan itu tercipta dikarenakan adanya keinginan pemerintah kolonial Inggris untuk menjadikan Malaya yang sebelumnya merupakan negara protektorat menjadi negara koloninya, dimana pada masa tersebut, Malaya terdiri atas tiga pemerintahan, yaitu *Negeri-Negeri Selat*, *Negeri-Negeri Melayu Bersekutu* dan *Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu*.⁵² Dengan adanya *Malayan Union*, pemerintah kolonial Inggris ingin menyatukan seluruh pemerintahan yang terdapat di Malaya dalam satu kesatuan.

Malayan Union sendiri dapat dikatakan, akan mengambil alih kekuasaan para sultan di Tanah Melayu dan menempatkan mereka di bawah seorang Gubernur Inggris yang berkuasa penuh bagi Tanah Melayu sehingga para sultan tersebut hanya berfungsi sebagai simbol semata. Kemudian, dalam hal pemberian kewarganegaraan menurut *Jus Joli*⁵³ menjadikan ras selain Melayu yang merupakan penduduk Malaya akan lebih mudah memperoleh kewarganegaraannya.⁵⁴

Ide pembentukan *Malayan Union* sangat ditentang oleh ras Melayu. Penentangan itu menjadikan ras Melayu melakukan penyatuan perpaduan sehingga pada 1946 terciptalah *Gabungan Melayu Semenanjung* yang dipimpin oleh Dato' Onn Jaafar. Pada 1-4 Maret 1946 dilangsungkan suatu kongres oleh 41 organisasi-organisasi ras Melayu di Kelab Sultan Sulaiman Kuala Lumpur, dimana kongres tersebut menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan Kongres

⁵² Peter Church, *Op. Cit.*, hlm. 89.

⁵³ *Jus Soli* adalah hak seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahirannya.

⁵⁴ James P. Ongkili, *Nation Building in Malaysia 1946-1974*, (Singapura: Oxford University Press, 1985), hlm. 113.

Melayu SeMalaya yang diketuai oleh Dato' Onn Jaafar untuk menentang *Malayan Union*.⁵⁵

Kongres Melayu SeMalaya bertujuan untuk menciptakan sebuah partai politik yang dapat mawadahi ras Melayu dalam mempertahankan kedudukan istimewanya di Malaya. Di tahun yang sama, Kongres Melayu SeMalaya telah menjalin kerjasama dengan para sultan Melayu untuk memboikot pelantikan Sir Edward Gent sebagai Gubernur *Malayan Union*. Pada pelantikan itu, tidak satupun sultan Melayu yang hadir sebagai tanda penghormatan maupun pengakuan terhadap seorang Gubernur *Malayan Union*. Hal ini telah memberikan suatu sinyalemen yang keras bagi pemerintah kolonial Inggris bahwa ras Melayu tidak setuju dengan pembentukan *Malayan Union*. Kemudian, usaha dari Kongres Melayu SeMalaya untuk mendirikan suatu partai politik sebagai wadah bagi kepentingan ras Melayu terwujud pada 11 Mei 1946 dengan berdirinya UMNO.⁵⁶

Di dalam UMNO, partai politik tersebut dipimpin oleh seorang presiden. Presiden UMNO memiliki seorang wakil yang disebut *Timbalan Presiden* UMNO. Kemudian terdapat *Naib Presiden* UMNO yang berjumlah sebanyak tiga orang. Sementara itu, *Majlis Tertingginya* (MT) dianggotai 27 orang.⁵⁷

Setelah UMNO terbentuk, UMNO maupun sebagian besar ras Melayu melakukan berbagai tekanan terhadap konsep *Malayan Union*. Pada 21 Januari 1948, *Malayan Union* dibubarkan dan diganti dengan Persekutuan Tanah Melayu (PTM). Meski dengan adanya PTM tidak serta-merta menghilangkan kekuasaan pemerintah kolonial Inggris, namun peran para sultan tidak hanya sebagai simbol semata seperti pada masa *Malayan Union*. Melalui PTM, sebuah undang-undang negeri haruslah melalui persetujuan sultan terlebih dahulu dan undang-undang negeri juga memiliki kuasa terhadap pengesahan undang-undang yang berkaitan dengan Agama Islam serta adat istiadat ras Melayu.⁵⁸

⁵⁵ Mardiana Noordin & Hasnah Hussiin, *Op. Cit.*, hlm. 55.

⁵⁶ In-Won Hwang, *Personalized Politics: The Malaysian State Under Mahathir*, (Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2003), hlm. 38.

⁵⁷ Jumlah anggota MT sebanyak 27 orang, 20 orang dipilih dalam pemilihan UMNO, 7 orang ditunjuk oleh Presiden UMNO. Selanjutnya dalam UMNO terdapat posisi *Setiausaha Agung* (yang berarti sekretaris jenderal dalam bahasa Indonesia) UMNO, Bendahara UMNO, Ketua Pemuda UMNO, Ketua Wanita UMNO, Ketua Cabang dan seterusnya. Mengenai struktur UMNO dan fungsi dari posisi-posisi elit yang terdapat dalam partai itu dapat dilihat pada lampiran.

⁵⁸ *Malaysia Kita*, *Op. Cit.*, hlm. 83-84.

UMNO sebagai sebuah partai politik, telah berperan untuk menentang *Malayan Union*, sehingga kemudian melahirkan PTM. Dengan demikian, kedudukan istimewa ras Melayu telah dikembalikan dan prinsip *Jus Joli* tidak lagi diberlakukan. Akan tetapi, meskipun *Malayan Union* dibubarkan, pemerintah kolonial Inggris berhasil menyatukan negeri-negeri di Tanah Melayu menjadi satu kesatuan pemerintahan, sehingga terdapat undang-undang kerakyatan yang meliputi seluruh negeri-negeri di Tanah Melayu yang tergabung dalam PTM. Undang-undang tersebut mempermudah ras non-Melayu untuk memperoleh kewarganegaraannya, meskipun undang-undang itu tidak lagi menganut prinsip *Jus Joli*.

Perjanjian yang kemudian melahirkan PTM, memiliki tujuan untuk menjadikan PTM mempunyai pemerintahannya sendiri untuk masa mendatang. Melalui hal itu akan digagas penyelenggaraan dari *pilihan raya*, yang akan diatur oleh Dewan PTM sebagai representasi dari pemerintah kolonial Inggris. Dengan demikian, melalui *pilihan raya* suatu kemerdekaan dari pemerintah kolonial Inggris terhadap PTM sedang diperjuangkan oleh UMNO.

Pada 27 Agustus 1951 dalam pertemuan UMNO, Dato' Onn Jaafar yang merupakan Presiden UMNO mengusulkan agar PTM dapat meraih kemerdekaannya, diperlukan suatu kerjasama yang konstruktif antara ras-ras di Malaysia. Dari hal tersebut, ia menggagas agar UMNO membuka keanggotaannya terhadap ras lain, sehingga UMNO tidak hanya merupakan partai politik yang mengutamakan kepentingan ras Melayu semata, tetapi juga ras Cina dan India. Usulan itu ditentang oleh sebagian besar anggota UMNO, sehingga Dato' Onn Jaafar harus mengundurkan diri dan kemudian mendirikan *Independence of Malay Party* (IMP) pada 16 September 1951 bersama sebagian kecil anggota UMNO.⁵⁹

Seiring dengan pengunduran diri Dato' Onn Jaafar sebagai Presiden UMNO, maka kedudukannya digantikan oleh Tunku Abdul Rahman yang merupakan *Timbalan* Presiden UMNO pada saat itu. Kemudian di Januari 1952, UMNO dan MCA menjalin sebuah koalisi politik yang disebut dengan nama *Parti Perikatan*. Pembentukan *Parti Perikatan* dalam rangka menghadapi *pilihan raya*

⁵⁹ Chamil Wariya, *Naik..., Op. Cit.*, hlm. 8-9.

*kecil*⁶⁰ di Kuala Lumpur pada Februari 1952.⁶¹ Persetujuan antara UMNO dan MCA dicapai melalui peran dari Dato' Yahya Abdul Razak yang merupakan Ketua Komite *Pilihan Raya* UMNO Kuala Lumpur dengan Tun Omar Ong Yoke Lin sebagai Ketua Komite Perhubungan MCA Selangor. Persetujuan mereka didukung oleh Tunku Abdul Rahman yang kemudian menjadi Presiden UMNO serta Tan Cheng Lock yang juga kemudian menjadi Presiden MCA. Kesepakatan yang terjalin antara dua partai politik itu adalah, MCA tidak akan berkompetisi di wilayah UMNO, sebaliknya UMNO juga tidak akan berkompetisi di wilayah MCA. Hasil dari jalinan *Parti Perikatan* berhasil memenangkan sembilan dari 12 kursi yang dipertandingkan.

Di tahun itu, partai lain yang berhasil meraih kursi adalah IMP⁶² sebanyak dua kursi dan satu kursi lainnya diraih oleh seorang calon dari non-partai. IMP yang berbeda dengan UMNO dalam target pemilihnya di masa itu juga telah menjalin kerjasama dengan MIC yang merupakan partai berbasis ras India. Dalam keanggotaan IMP, partai tersebut berisikan ras Melayu, Cina dan India untuk meraih suara dari tiga ras utama di PTM. Seiring dengan kealahannya dalam *pilihan raya kecil* di Kuala Lumpur, maka sebagian besar anggotanya yang merupakan ras Cina kemudian berpindah ke MCA.⁶³ MIC sendiri kemudian bergabung dengan *Parti Perikatan* pada tahun 1955.⁶⁴

Melalui hasil yang dicapai pada *pilihan raya kecil* itu, UMNO dan MCA kemudian bersepakat untuk menjadikan *Parti Perikatan* melanjutkan koalisinya di tingkat nasional pada *pilihan raya* 1955. Target utama dari *Parti Perikatan* yaitu, memperjuangkan kemerdekaan Tanah Melayu dan memenangi *pilihan raya* 1955.

Di tahun 1953, *Parti Perikatan* telah menjadi partai politik yang paling berpengaruh di PTM. Partai itu membuat tuntutan kepada pemerintah kolonial Inggris agar para anggota dewan dalam Dewan PTM dipilih melalui *pilihan raya*,

⁶⁰ *Pilihan raya kecil* merupakan suatu pemilihan untuk memilih *Dewan Undangan Negeri* (DUN). DUN berfungsi sama seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Indonesia.

⁶¹ Diperoleh dari buku Mohamed Rahmat, *Barisan Nasional, "Balancing Communal Rights"*, (Kuala Lumpur : 59iCons & Catalyst Media Sdn Bhd, 2001), hlm. 8.

⁶² IMP merupakan partai yang didirikan oleh Dato' Onn Jaafar yang juga merupakan tokoh pendiri UMNO. Tidak seperti UMNO yang merupakan partai berbasis ras Melayu, IMP merupakan partai yang bersifat multiras secara keanggotaan dan target pemilihnya berdasarkan gabungan dari ras Melayu, Cina dan India.

⁶³ Hng Hung Yong, *Op.Cit.* , hlm. 78.

⁶⁴ Mardiana Noordin & Hasnah Hussiin, *Op. Cit.*, hlm. 55.

tidak melalui pengangkatan oleh pemerintah kolonial Inggris. Melalui hal itu, maka para anggota *Parti Perikatan* berpeluang untuk menjadi anggota dewan yang merumuskan undang-undang maupun menjalankan pemerintahan di PTM.

Parti Perikatan menuntut dua hal kepada pemerintah kolonial Inggris, yaitu, *pertama*, dilangsungkannya *pilihan raya* selambat-lambatnya tahun 1954. *Kedua*, anggota dewan yang terdapat di dalam Dewan PTM merupakan suara mayoritas berdasarkan kemenangan dalam suatu *pilihan raya*. Tuntutan dari *Parti Perikatan* dipenuhi oleh pemerintah kolonial Inggris pada 27 Juli 1953.⁶⁵

Di 27 Juli 1955, *pilihan raya* yang pertama bagi PTM dilangsungkan. *Parti Perikatan* yang terdiri atas koalisi UMNO, MCA dan MIC menempatkan calon bagi kursi anggota dewan dari UMNO sebanyak 35 orang, MCA 15 orang dan MIC dua orang. Partai-partai lain yang mengikuti *pilihan raya* ketika itu diantaranya adalah PAS, *Parti Buruh*, *Parti Negara*⁶⁶ dan *Parti Progresif Rakyat (PPP)*. Pada *pilihan raya* tersebut, *Parti Perikatan* berhasil meraih 51 dari 52 kursi yang diperebutkan, sedangkan satu kursi sisanya diraih oleh PAS. Berdasarkan hasil *pilihan raya*, maka *Parti Perikatan* mendominasi suara mayoritas di dewan sehingga dapat membentuk sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman.⁶⁷

Setelah *Parti Perikatan* berhasil memenangi *pilihan raya* 1955, PTM telah menjadi sebuah negara yang memiliki sistem pemerintahan sendiri. Meskipun secara administratif negara itu masih berada di bawah Inggris, namun pemerintahan yang berjalan melalui hasil yang dicapai pada *pilihan raya*, dengan kata lain tidak lagi melalui pengangkatan oleh pemerintah kolonial Inggris. Dalam kampanyenya pada *pilihan raya* 1955, *Parti Perikatan* menjanjikan kemerdekaan PTM dari pemerintah kolonial Inggris dalam waktu empat tahun. Sebaliknya, dalam waktu dua tahun, PTM berhasil meraih kemerdekaannya.

Faktor utama PTM dapat meraih kemerdekaan lebih cepat daripada yang mereka targetkan adalah terpenuhinya syarat dari pemerintah kolonial Inggris,

⁶⁵ *Malaysia Kita, Op. Cit.*, hlm. 82-83.

⁶⁶ *Parti Negara* merupakan bentuk baru dari IMP. IMP yang tidak efektif dalam meraih suara dibubarkan pada 1953 dikarenakan mayoritas anggotanya yang merupakan ras Cina telah berpindah ke MCA. Partai ini juga merupakan partai yang didirikan oleh Dato' Onn Jaafar, dimana partai ini mengusung konsep yang berbeda dengan IMP, yaitu lebih mementingkan kepentingan ras Melayu.

⁶⁷ Mohamed Rahmat, *Op. Cit.*, hlm. 19.

yaitu adanya perpaduan ras diantara mereka sendiri. Pemerintah kolonial Inggris mengharuskan rakyat PTM bekerjasama dan bersatu padu dalam bidang politik. Kemenangan *Parti Perikatan* telah menjadikan Inggris tidak memiliki alasan lain untuk memberi kemerdekaan bagi PTM.⁶⁸ Terlebih lagi, kemenangan besar *Parti Perikatan* pada *pilihan raya* menunjukkan dukungan sebagian besar rakyat PTM terhadap keinginan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Inggris dengan menjadikan *Parti Perikatan* sebagai representasi suara mereka.

Parti Perikatan juga menganut prinsip ekonomi pasar bebas dalam menerapkan sistem ekonominya, khususnya terhadap kalangan asing yang melakukan investasi maupun perdagangan di Tanah Melayu. Dengan demikian, kepentingan ekonomi pemerintah kolonial Inggris yang telah terdapat di Tanah Melayu tetap dijamin oleh *Parti Perikatan*. Jaminan dari *Parti Perikatan* itu merupakan kerjasama dan perjanjian tingkat lanjut untuk menjaga kepentingan ekonomi pemerintah kolonial Inggris di Tanah Melayu.⁶⁹

Setelah meraih kemerdekaannya pada 31 Agustus 1957, *Parti Perikatan* menyiapkan *pilihan raya* yang pertama pasca kemerdekaannya dari pemerintah kolonial Inggris. *Pilihan raya* yang akan dilangsungkan pada 1959, diawali dengan *pilihan raya kecil* untuk memilih kepala pemerintahan daerah serta *Dewan Undangan Negeri* (DUN). Pada *pilihan raya kecil* kala itu, partai-partai yang ikut berkompetisi selain *Parti Perikatan* adalah PAS, Barisan Sosialis⁷⁰, PPP, *Parti Negara* dan *Malayan Party*. Sedangkan sebanyak 27 orang merupakan calon dari non-partai.

Hasil secara keseluruhan pada *pilihan raya kecil* 1959, *Parti Perikatan* hanya meraih 74 (UMNO 52, MCA 19 dan MIC tiga kursi) dari 104 kursi di Dewan Rakyat. UMNO melalui *Parti Perikatan* kehilangan kursi kepada PAS di wilayah basis ras Melayu dalam *pilihan raya kecil* di Kelantan dan Trengganu.⁷¹

Dalam *pilihan raya kecil* pada 18 Agustus 1959 tersebut, partai-partai politik oposisi seperti PAS, *Parti Negara*, Barisan Sosialis dan PPP mampu

⁶⁸ Vejai Balasubramaniam, *Politik Nasionalisme dan Federalisme di Malaysia*, (Selangor Darul Ehsan : Fajar Bakti Sdn Bhd, 1998), hlm. 107.

⁶⁹ *Malaysia Kita, Op. Cit.*, hlm. 84.

⁷⁰ Barisan Sosialis merupakan partai gabungan dari *Parti Buruh* yang pernah berkompetisi sebelumnya pada pilihan raya 1955 dan *Parti Rakyat*.

⁷¹ Kemenangan PAS atas UMNO dikarenakan PAS mengedepankan bahwa kemerdekaan yang telah diraih di tahun 1957 kurang mengutamakan kedaulatan Melayu.

meraih suara yang lebih baik dibandingkan *pilihan raya* 1955. Di tahun itu, partai-partai politik oposisi mampu memainkan peranannya dalam mengkampanyekan kedudukan istimewa dari ras Melayu⁷² di PTM, hal ini terutama digunakan sebagai kampanye dari PAS maupun *Parti Negara*. Di lain pihak, PPP dan Barisan Sosialis khawatir jika kedudukan istimewa ras Melayu merupakan hal yang utama, maka ras Cina akan semakin dikesampingkan di PTM. Masalah kedudukan istimewa ras Melayu tersebut dimanfaatkan oleh PAS maupun *Parti Negara* dengan mengatakan bahwa UMNO telah memberikan terlampau banyak ruang bagi ras non-Melayu. PPP dan Barisan Sosialis sendiri menuduh MCA tidak dapat memperjuangkan kepentingan ras non-Melayu, khususnya ras Cina dengan menyatakan bahwa kebijakan masalah diutamakannya kedudukan istimewa ras Melayu hanyalah menguntungkan ras Melayu semata.

Hal lain yang menguntungkan partai-partai politik oposisi, sebelum dimulainya *pilihan raya* 1959 yaitu, dikarenakan adanya masalah internal dalam *Parti Perikatan*. MCA menginginkan agar pembagian jumlah kursi yang seharusnya dapat mereka raih ditingkatkan sesuai dengan argumen bahwa sebanyak 36 persen pemilih merupakan ras Cina. Dengan demikian, dari 104 kursi yang akan dipertandingkan, MCA berkeinginan untuk mendapat bagian sebanyak 40 kursi. Peningkatan jumlah kursi bagi MCA untuk *pilihan raya* 1959 tentunya berbeda dengan hasil yang mereka raih pada *pilihan raya* sebelumnya, dimana MCA hanya memperoleh 15 dari 51 kursi yang mampu diraih oleh *Parti Perikatan*. Pada akhirnya kemudian disepakati bahwa pembagian kursi untuk MCA sebanyak 31 kursi.⁷³

Masalah internal dalam *Parti Perikatan* yang juga menguntungkan partai-partai politik oposisi adalah, usulan MCA mengenai kebijakan untuk memasukkan pendidikan ras Cina dalam manifesto *Parti Perikatan*.⁷⁴ Usulan itu tentunya tidak disetujui oleh Tunku Abdul Rahman yang merupakan Presiden UMNO, baginya hal itu akan menghilangkan kepercayaan ras Melayu terhadap UMNO, yang

⁷² Kedudukan istimewa ras Melayu melingkupi peran sultan, penggunaan bahasa, pendidikan hingga budaya Melayu di PTM dalam mempertahankan identitas ras Melayu. Untuk hal ini, ras Melayu memiliki kelebihan dibandingkan ras Cina maupun India. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh partai-partai politik oposisi dalam kampanyenya pada pilihan raya 1959.

⁷³ Hng Hung Yong, *Op. Cit.*, hlm. 92.

⁷⁴ R. S. Milne & Diane K. Mauzy, *Op., Cit.*, hlm. 26 & 31.

berpotensi untuk mengukuhkan PAS sebagai salah satu partai yang berbasiskan ras Melayu. Usulan yang tidak disetujui tersebut mengakibatkan menurunnya perolehan suara bagi MCA dari ras Cina dalam *Parti Perikatan*.

Pada bulan Mei 1959, terjadi kerusuhan ras di kepulauan Pangkor yang terdapat di negara bagian Perak. Kerusuhan itu terjadi dikarenakan adanya kesalah-pahaman kecil antara ras Cina dan Melayu pada tingkat pedesaan yang telah menciptakan perasaan saling curiga antara ras dan memungkinkan potensi meluasnya konflik di negara bagian itu. Konflik tersebut berhasil dicegah dampaknya agar tidak meluas, namun informasi mengenai terjadinya kerusuhan ras tersebut telah menyebar keluar dari wilayah terjadinya kerusuhan. Dengan adanya informasi mengenai kerusuhan ras, terdapat kemungkinan adanya pengaruh pada *pilihan raya* yang akan dilangsungkan bulan-bulan berikutnya. Dalam hal ini, partai-partai politik di Malaysia yang mengedepankan unsur memperjuangkan kepentingan ras masing-masing, tentunya akan memberikan pengaruh kepada para pemilih dalam menentukan partai politik pilihannya.

Ketika *pilihan raya* diawali dengan *pilihan raya kecil*, dominasi *Parti Perikatan* mulai berkurang. Di negara bagian Penang, Barisan Sosialis berhasil memperoleh tujuh dari 24 kursi yang diperebutkan, sementara itu di negara bagian Perak, PPP mampu meraih delapan dari 39 kursi yang dipertandingkan.⁷⁵ Meskipun sebagian besar kursi sebetulnya berhasil direbut oleh *Parti Perikatan*, tetapi hasil *pilihan raya kecil* di dua negara bagian itu telah memperlihatkan beralihnya para pemilih ras Cina dari *Parti Perikatan*, dikarenakan Barisan Sosialis dan PPP merupakan partai-partai politik oposisi yang berfokus pada perolehan suara dari ras Cina. Partai-partai politik yang berbasiskan ras Cina itu dapat memanfaatkan momentum kerusuhan ras di negara bagian Perak, sehingga memberi kesan MCA sebagai partai politik yang tergabung dalam *Parti Perikatan* kurang berpihak kepada kepentingan ras Cina. Hal tersebut dikarenakan MCA bekerjasama dengan UMNO yang merupakan partai dari ras Melayu di *Parti Perikatan*.

Sementara itu, di negara bagian Kelantan dan Trengganu, PAS dan *Parti Negara* mendominasi perolehan kursi dibandingkan *Parti Perikatan*. Kedua partai

⁷⁵ Hng Hung Yong, *Op. Cit.*, hlm. 89.

politik tersebut berhasil mendominasi perolehan kursi dengan memfokuskan kampanyenya pada masalah kedudukan istimewa dari ras Melayu dan masalah keagamaan. Di negara bagian Kelantan, PAS berhasil meraih 28 dari 30 kursi yang diperebutkan, dimana sisanya diraih oleh *Parti Perikatan*. Sedangkan untuk negara bagian Trengganu, PAS berhasil meraih 13 dari 24 kursi yang dipertandingkan. *Parti Perikatan* sendiri hanya memperoleh tujuh kursi, di lain pihak *Parti Negara* meraih empat kursi.⁷⁶ Dengan adanya hasil perolehan kursi yang didominasi oleh PAS tentunya menjadikan partai politik oposisi itu dapat menjalankan pemerintahan pada kedua negara bagian yang dikuasainya sekaligus mengakhiri dominasi *Parti Perikatan* dalam kedua negara bagian tersebut.

Dapat dikatakan pula pada *pilihan raya* tersebut *Parti Perikatan* mampu mempertahankan dominasinya dalam membentuk pemerintahan dikarenakan tidak terdapatnya koalisi konstruktif antara partai-partai oposisi sebagaimana yang dilakukan oleh *Parti Perikatan*.⁷⁷

Di tahun 1960, ancaman komunisme di sekitar wilayah Malaya menjadikan Tunku Abdul Rahman kemudian mencari suatu penyelesaian serius dengan menggabungkan Singapura, Sabah dan Sarawak ke dalam PTM, sehingga kemudian lahirlah Malaysia pada 31 Agustus 1963.⁷⁸

Pada tahap awal kelahiran Malaysia, Tunku Abdul Rahman sebagai PM PTM dan Lee Kuan Yew sebagai PM Singapura menjalin suatu hubungan yang baik untuk menciptakan stabilitas politik melalui pendirian Malaysia. Akan tetapi, hubungan tersebut terganggu sejak perbedaan pandangan dalam mengatur masalah keuangan antara Lee Kuan Yew yang juga merupakan Presiden *People Action Party* (PAP) dengan Tun Tan Siew Win yang merupakan Menteri Keuangan Malaysia dan Presiden MCA. PAP yang merupakan partai berdasarkan ras Cina di Singapura secara tidak langsung juga menciptakan persaingan dengan MCA sebagai partai berbasis ras Cina di Malaysia.

Dalam hal ini, Lee Kuan Yew melihat peluang bagi PAP untuk memperbesar pengaruh serta kekuasaannya tidak hanya pada wilayah Singapura

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 89.

⁷⁷ Disarikan dari buku Fauziah Shaffie & Ruslan Zainuddin, *Sejarah Malaysia*, (Selangor Darul Ehsan: Fajar Bakti Sdn. Bhd., 2000), hlm. 474.

⁷⁸ Diperoleh dari buku Paridah Abd. Samad, *Tun Abdul Razak, A Phenomenon in Malaysian Politics*, (Kuala Lumpur : Affluent Master Sdn Bhd, 1998), hlm. 36.

saja, namun juga wilayah Malaysia dikarenakan besarnya potensi suara dari ras Cina yang dapat diraih PAP dalam perpolitikan di Malaysia. Sementara itu, persaingan antara MCA dan PAP kurang diperhatikan oleh Tunku Abdul Rahman, dengan anggapan bahwa PAP akan puas apabila diberi kendali penuh terhadap Singapura.⁷⁹ Persaingan untuk meraih suara ras Cina antara MCA dengan PAP menemui momentumnya pada *pilihan raya* 1964. Pada momentum tersebut, PAP berusaha untuk meraih suara dari ras Cina yang lebih banyak daripada yang dapat diraih oleh MCA, tetapi MCA justru mendapat kursi sebanyak 27, dibandingkan dengan PAP yang hanya mampu meraih satu kursi.

Pilihan raya di tahun itu juga memberikan peningkatan kursi bagi *Parti Perikatan*, dengan meraih 89 dari 104 kursi yang diperebutkan. Peningkatan jumlah kursi bagi *Parti Perikatan* dikarenakan isu konfrontasi dengan Indonesia. Isu itu sangat berpengaruh terhadap dukungan bagi *Parti Perikatan* dari rakyat Malaysia.⁸⁰

Pasca kekalahan PAP pada *pilihan raya* 1964, Lee Kuan Yew menggagas pembentukan satu partai oposisi koalisi terhadap *Parti Perikatan* dengan nama *Malaysia Solidarity Consultative Convention*. Lee Kuan Yew juga mengkampanyekan paham *Malaysian Malaysia*⁸¹ untuk mengkritik dominasi ras Melayu dalam pemerintahan.⁸² Pernyataan Lee Kuan Yew tersebut menimbulkan gejolak dalam perpolitikan Malaysia, terutama di wilayah Singapura. Melihat hal itu, Tunku Abdul Rahman mengambil keputusan bahwa ia tidak lagi memiliki kekuasaan atas Singapura. Demi menjaga kestabilan politik dan hubungan baik dengan Singapura, maka kebijakan yang diambil oleh Tunku Abdul Rahman adalah memisahkan Singapura dari Malaysia pada 1965.⁸³ Sedangkan Sabah dan Sarawak tetap berada dalam Malaysia.

Seiring dengan keluarnya Singapura dari Malaysia, maka peran PAP yang terdapat di Malaysia kemudian diteruskan oleh *Democratic Action Party* (DAP). DAP dan *Gerakan* berfokus untuk meraih suara dari ras Cina dengan berkompetisi

⁷⁹ *Malaysia Kita, Op. Cit.*, hlm. 121.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Malaysian Malaysia* adalah suatu kampanye politik yang menggagas adanya persamaan hak dalam segala bidang bagi seluruh ras di Malaysia.

⁸² Lihat Lee Hock Guan, *Political Parties and The Politics of Citizenship and Ethnicity in Peninsular Malaysia, 1957-1968*, (Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2001).

⁸³ Mardiana Noordin & Hasnah Hussin, *Op. Cit.*, hlm. 77.

terhadap MCA yang tergabung dalam *Parti Perikatan*. DAP dan *Gerakan* mengkampanyekan persamaan terhadap semua ras di Malaysia, dengan kata lain kedua partai ini mengkritik kebijakan *Ketuanan Melayu* yang dianggap lebih menguntungkan ras Melayu dibandingkan ras lainnya di Malaysia.⁸⁴ PPP sendiri yang juga bertujuan untuk meraih suara tidak hanya dari ras Cina, tetapi juga dari ras India di Negara Bagian Perak, memiliki keinginan yang sama dengan DAP maupun *Gerakan*. Ketiga partai politik ini kemudian sepakat untuk tidak saling berkompetisi pada wilayah yang dianggap basis suara utama dari masing-masing partai.⁸⁵

Melalui kampanye adanya tujuan persamaan terhadap semua ras di Malaysia serta adanya kesepakatan untuk tidak saling berkompetisi dalam wilayah yang dianggap sebagai basis suara utama bagi masing-masing partai, maka pada *pilihan raya* 1969, ketiga partai tersebut mampu membendung dominasi *Parti Perikatan* dalam membentuk pemerintahan.

Dalam *pilihan raya* 1969, *Parti Perikatan* kehilangan banyak kursi kepada partai-partai oposisi. Wilayah Selangor yang merupakan kawasan terpenting dikarenakan terletakinya Kuala Lumpur sebagai ibu kota telah dikuasai oleh kalangan oposisi diantaranya DAP, *Gerakan* maupun PPP.⁸⁶ Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kalangan pemilih yang berasal dari ras Cina tidak lagi memilih MCA yang terdapat dalam *Parti Perikatan*.

Dengan hasil perolehan suara *pilihan raya* 10 Mei 1969, meski DAP hanya mampu meraih 13 kursi, *Gerakan* delapan kursi, PPP empat kursi, sedangkan *Parti Perikatan* mampu meraih 66 kursi, di lain pihak 12 kursi diraih oleh PAS, namun hasil tersebut sangat berpengaruh terhadap dominasi *Parti Perikatan*.⁸⁷ Hal itu dikarenakan MCA telah banyak kehilangan suara dengan berkompetisinya tiga partai politik yang memfokuskan perolehan suara dari ras non Melayu, khususnya Cina. MCA hanya mampu meraih 13 kursi dari 27 kursi yang mampu diraihinya pada *pilihan raya* 1964.⁸⁸ Di *pilihan raya kecil*, DAP mampu meraih 31 dari 57 kursi yang diikutinya, *Gerakan* meraih 26 dari 37 kursi

⁸⁴ Paridah Abd. Samad, *Op. Cit.*, hlm. 53.

⁸⁵ Hng Hung Yong, *Op. Cit.*, hlm. 100.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 102.

⁸⁷ R. K. Vasil, *Ethnic Politics in Malaysia*, (New Delhi: Radiant Publishers, 1980), hlm. 172.

⁸⁸ Hng Hung Yong, *Op. Cit.*, hlm. 102.

yang diikutinya, dan PPP meraih 12 dari 16 kursi yang diikutinya. Sedangkan MCA hanya mampu meraih 26 dari 80 kursi yang diikutinya.⁸⁹ Dari hal itu dapat dilihat bahwa mayoritas ras Cina sudah tidak lagi memberikan dukungannya kepada *Parti Perikatan*, terutama terhadap MCA sebagai partai yang berbasis suara dari ras Cina dalam partai koalisi tersebut.

Hasil dari *pilihan raya* 1969 menjadikan suatu euforia bagi ras Cina yang menganggap ras Melayu sudah tidak lagi mendominasi perpolitikan di Malaysia. Ras Cina pun melakukan pawai kemenangan di Kuala Lumpur, yang kemudian dari pawai tersebut menciptakan kerusuhan ras antara ras Cina dengan ras Melayu pada 13 Mei 1969. Kerusuhan tersebut meluas selain di sebagian besar wilayah Kuala Lumpur, juga di sebagian besar wilayah Selangor. Perbandingan angka korban jiwa antara ras non Melayu dengan Melayu adalah enam berbanding satu orang.⁹⁰

Peristiwa tersebut menjadikan Tunku Abdul Rahman mengundurkan diri sebagai PM maupun Presiden UMNO. Posisinya kemudian ditempati oleh Tun Abdul Razak. Tun Abdul Razak menciptakan pemerintahan darurat yang disebut *Majlis Gerakan Negara* (MAGERAN). MAGERAN terdiri dari para elit politik, para birokrat pemerintahan, polisi dan tentara yang bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti semula.⁹¹ Melalui MAGERAN dilahirkan suatu *Rukun Negara* yang berisi lima butir penting: Kepercayaan Kepada Tuhan, Kesetiaan Kepada Raja dan Negara, Keluhuran Perlembagaan, Kedaulatan Undang-Undang, kemudian Kesopanan dan Kesusilaan. Kritik terhadap dominasi ras Melayu dalam pemerintahan dilarang untuk menjangka terulangnya kerusuhan ras yang terjadi pada 13 Mei 1969.⁹²

Melalui peran Tun Abdul Razak pula, *Parti Perikatan* diperluas koalisinya tidak hanya berdasarkan partai koalisi yang berdasarkan unsur ras semata, dimana kemudian *Parti Perikatan* berganti nama menjadi BN. Untuk memperoleh legitimasi yang lebih kuat dalam menghasilkan parlemen yang dapat menjalankan pemerintahan yang stabil, maka pada 1971, BN yang dipimpin oleh Tun Abdul

⁸⁹ R. K. Vasil, *Op. Cit.*, hlm. 174.

⁹⁰ R. S. Milne & Diane K. Mauzy, *Op. Cit.*, hlm. 79.

⁹¹ Mardiana Noordin & Hasnah Hussiin, *Op. Cit.*, hlm. 176.

⁹² *Malaysia Kita, Op. Cit.*, hlm. 124-125.

Razak mampu meraih mayoritas kursi 2/3 di parlemen.⁹³ Tidak hanya itu, BN juga kemudian mampu menjadikan PAS, *Gerakan*, PPP, serta partai-partai politik lainnya tergabung dalam koalisinya.

Partai-partai yang kemudian tergabung dengan BN selain UMNO, MCA dan MIC adalah *Gerakan*, PAS, *Parti Pesaka Bumiputera Bersatu* (PBB), PPP, *Sarawak United People's Party* (SUPP) dan *Sabah Alliance Party*.⁹⁴ Sedangkan DAP sendiri tetap memposisikan dirinya di luar BN. Terdapatnya UMNO dan PAS sebagai partai berdasarkan basis ras Melayu menjadikan suara ras Melayu terbagi dua, sedangkan adanya MCA dan *Gerakan* juga menjadikan kedua partai itu berbagi suara dari ras Cina. BN kemudian resmi menjadi partai politik yang terdaftar pada 1 Juni 1974, dimana pada tahun yang sama di bulan Agustus pada *pilihan raya*, BN mampu meraih 135 dari 154 kursi yang dipertandingkan.⁹⁵

Dengan demikian, kerjasama politik yang pada awalnya dibangun melalui koalisi antara UMNO dengan MCA dalam *Parti Perikatan* di tahun 1952, kemudian pada akhirnya mampu diperluas bentuk kerjasamanya pada koalisi itu dengan bertambahnya partai-partai politik dalam meraih suara dengan adanya BN yang lahir pada 1974. Kelahiran BN juga berisikan partai-partai yang sebelumnya merupakan partai-partai yang pernah berseberangan dengannya, seperti *Gerakan*, PAS maupun PPP. Tentunya hal tersebut tidak terlepas dari peran UMNO sebagai partai politik yang mampu mengkonsolidasikan partai-partai politik yang sebelumnya berseberangan dengannya itu.

2. 2 Peran UMNO Dalam BN

Pada tahun kelahiran BN di 1974, dalam masa transformasinya yang berasal dari *Parti Perikatan*, terdapat 9 partai politik yang tergabung di dalamnya. Akan tetapi, partai selain UMNO yang juga memiliki peran penting adalah MCA dan MIC. Dapat dikatakan pula, sebetulnya MCA lebih berperan daripada MIC, dikarenakan MCA juga merupakan partai penggagas koalisi *Parti Perikatan*. Hal lainnya, secara komposisi jumlah ras, ras Cina memiliki jumlah kedua terbesar setelah ras Melayu, dimana ras India merupakan ras ketiga terbesar. Dalam

⁹³ *Ibid.*, hlm. 125.

⁹⁴ Hng Hung Yong, *Op.Cit.* , hlm. 105.

⁹⁵ Mohamed Rahmat, *Op. Cit.*, hlm. 12-13.

perpolitikan Malaysia sendiri, partai politiknya berdasarkan unsur dari masing-masing ras, maka partai politik berdasarkan ras yang terbanyak jumlah populasinya, mendominasi perpolitikan di Negara Malaysia. Dengan demikian, peran UMNO dalam BN melalui kerjasama dengan MCA kemudian MIC merupakan hal yang penting dalam jalinan koalisi politik di negara tersebut.

Peran utama UMNO dalam BN dicapai melalui persetujuan kerjasama koalisi yang kemudian menempatkan UMNO sebagai partai politik utama pada kerjasamanya dengan kesepakatan *Ketuanan Melayu* di dalamnya. Di masa kemerdekaan PTM di tahun 1957 disepakati bahwa, PTM menjadi negara berbagai ras dengan jaminan *Ketuanan Melayu* sebagai pemilik asal negara PTM harus dipertahankan, meskipun tidak dalam bentuk mutlak.

Ketika itu, ras Melayu setuju untuk menerima ras non-Melayu yang berstatus imigran menjadi warganegara PTM. Sebaliknya, para pemimpin ras non-Melayu juga setuju untuk mendukung UMNO dalam menjunjung kedaulatan sultan-sultan Melayu, mendaulatkan perlembagaan negara, bahasa Melayu, Islam sebagai agama negara, serta beberapa hal lain yang menjadikan ras Melayu memiliki hak istimewa, diantaranya: memperoleh kemudahan di bidang pendidikan, kemudahan sebagai birokrat pemerintahan, kepolisian, angkatan bersenjata kemudian langkah-langkah ekonomi lainnya untuk memperbaiki kedudukan sosio-ekonomi ras Melayu.⁹⁶ Segala keistimewaan bagi ras Melayu tersebut kemudian diartikan sebagai *Ketuanan Melayu*.

Secara khusus, yang menjadi hak istimewa ras Melayu adalah diutamakannya ras itu dalam pemberian beasiswa dan dalam hal birokrasi pemerintahan, dimana perbandingan kuotanya adalah setiap 4 orang ras Melayu berbanding dengan 1 orang dari ras non-Melayu.⁹⁷

Berbagai keistimewaan yang dimiliki oleh ras Melayu tersebut tidak sepenuhnya bersifat mutlak dalam hal ekonomi. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya dalam kegiatan ekonomi, ras non-Melayu tidak dihalangi, maupun disekat, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa ras Melayu memiliki akses yang lebih menguntungkan dibandingkan ras lainnya.

⁹⁶ Chamil Wariya, *UMNO...Op.Cit.*, hlm. 149.

⁹⁷ Dapat dilihat pula pada situs resmi UMNO, www.umno.org.my/sejarah.

Dalam hal bahasa, meski bahasa Melayu dijadikan bahasa resmi negara, namun penggunaan bahasa lainnya tetap diizinkan. Sedangkan dalam hal agama, kegiatan beribadah dari agama di luar Islam, tetap bebas untuk dianut dan dijalankan peribadatnya sesuai dengan yang dianut oleh masing-masing ras lainnya.⁹⁸

Terlebih lagi, dengan masuknya ras non-Melayu sebagai warganegara maka ras non-Melayu juga memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan hak politiknya melalui *pilihan raya*. Karena konstitusi Malaysia memungkinkan seorang ras non-Melayu untuk memimpin pemerintahan apabila seseorang tersebut mampu terpilih sebagai pemimpin partai yang memperoleh suara terbanyak dalam suatu *pilihan raya*. Akan tetapi, tidak dapat dikesampingkan pula bahwa dalam BN yang merupakan partai politik dominan, UMNO merupakan partai utama yang memimpin partai tersebut.⁹⁹ Dengan demikian, UMNO sebagai partai yang memimpin BN, secara otomatis juga mendominasi jalannya pemerintahan.

UMNO dan MCA yang merupakan partai awal penggagas terbentuknya *Parti Perikatan* yang kemudian bertransformasi menjadi BN, masing-masing bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan dari ras masing-masing melalui pola kerjasama koalisi yang dibangunnya. Dalam doktrin UMNO di masa koalisi dibangun pada tahun 1952, partai itu memiliki tujuan untuk melindungi dan mempertahankan *Ketuanan Melayu*, mengembangkan agama serta penerapan hukum Islam terhadap pemeluknya di wilayah Malaya serta menciptakan kemajuan langkah-langkah ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, secara umum bagi warganegara Malaya dan secara khusus bagi ras Melayu.¹⁰⁰ Sedangkan MCA sendiri memiliki pemahaman menjaga, memajukan dan mempertahankan kepentingan dalam hal politik, sosial, pendidikan, kebudayaan

⁹⁸ Chamil Wariya, *UMNO...*, *Op.Cit.*, hlm. 150.

⁹⁹ Dalam perpolitikan di Malaysia, ras Melayu yang merupakan ras utama, hanya memiliki dua partai utama yang berdasarkan ras, yaitu UMNO dan PAS. Sedangkan ras Cina yang merupakan ras kedua terbesar di Malaysia memiliki beberapa partai yang berdasarkan ras, seperti MCA, *Gerakan* maupun DAP. Dapat dilihat bahwa kompetisi antara partai dari ras Cina lebih tinggi jika dibandingkan dengan kompetisi antara partai dari ras Melayu. Hal itu dikarenakan populasi mereka yang tidak sebesar ras Melayu, namun jumlah partai yang berusaha meraih pemilih dari ras Cina sedikit lebih banyak dibandingkan jumlah partai dari ras Melayu.

¹⁰⁰ Diterjemahkan dan dikutip dari *Undang-Undang Tubuh, United Malays National Organization*, 16 dan 17 April 1960, hlm. 1-2.

dan hal lainnya bagi para anggotanya dengan tetap berpegang pada konstitusi, membantu suatu penyelesaian politik yang berdampak terhadap para anggotanya secara keseluruhan dan melestarikan penggunaan bahasa Cina.¹⁰¹

Dapat dilihat bahwa kedua doktrin dari UMNO maupun MCA memiliki tujuan sebagai sarana kepentingan bagi ras masing-masing dalam memperjuangkan agendanya. Pada titik inilah kemudian peran UMNO dalam BN menjadi dominan dikarenakan faktor jumlah ras Melayu yang lebih besar daripada ras lainnya serta kesepakatan yang dicapai sebelumnya dalam koalisi dengan adanya *Ketuanan Melayu*.

Di dalam struktur BN sendiri, UMNO menempati tempat khusus dengan adanya posisi strategis bagi Presiden maupun *Timbalan* Presiden UMNO di dalamnya. Pada struktur itu, walaupun presiden BN dipilih oleh Dewan Tertinggi BN, namun selalu diisi oleh Presiden UMNO. Sedangkan untuk posisi *Timbalan* presiden BN yang merupakan perwakilan yang dipilih oleh anggota dari masing-masing partai dalam BN, berisikan Presiden dari masing-masing partai yang tergabung di BN, kecuali UMNO. Posisi Presiden BN yang diisi oleh Presiden UMNO menjadikan *Timbalan* Presiden UMNO berada pada posisi yang sejajar dengan para presiden partai yang tergabung di BN sebagai *Timbalan* Presiden BN.¹⁰² Dengan demikian dapat dilihat bahwa kedudukan para presiden partai lain yang tergabung di BN berada di bawah Presiden UMNO.

Peran UMNO yang menentukan berjalannya pemerintahan di Malaysia dikarenakan Presiden UMNO sebagai presiden dari partai politik yang merupakan pemenang *pilihan raya* ataupun yang meraih suara terbanyak pada parlemen, dalam hal ini BN yang sebelumnya merupakan *Parti Perikatan*. Dengan itu, menjadikan Presiden UMNO merupakan PM Malaysia yang juga berarti, seseorang yang berkedudukan sebagai kepala pemerintahan.

Bagi sebagian besar ras Melayu yang direpresentasikan oleh UMNO dalam perpolitikan di Malaysia, merupakan suatu hal yang utama untuk menjalankan administrasi dan pemerintahan sebagai alat pengontrol dominasi ras

¹⁰¹ Diterjemahkan dan dikutip dari *Constitution of The Malaysian Chinese Association*, 12 November 1963, hlm. 2-3.

¹⁰² Untuk lebih lengkapnya mengenai struktur BN dapat dilihat dalam buku Mohamed Rahmat, *Op.Cit.*, hlm 42-44.

non-Melayu, khususnya ras Cina yang mendominasi aspek ekonomi dan perdagangan. Dari hal tersebut diharapkan ras Melayu mampu mensejajarkan perekonomiannya dengan ras Cina melalui kontrol di bidang politik, sehingga stabilitas politik dan ekonomi di Malaysia dapat berjalan dengan baik.¹⁰³

Melalui peran PM Malaysia yang merupakan Presiden UMNO sekaligus juga merupakan Presiden BN, maka PM Malaysia membentuk kabinetnya dengan adanya hak prerogatif dengan mempertimbangkan informasi dari partai-partai yang tergabung dalam BN. Seorang PM yang merupakan Presiden UMNO tersebut membentuk kabinetnya secara mayoritas dengan memilih perwakilan-perwakilan dari UMNO dengan tetap memilih perwakilan-perwakilan dari partai lain yang tergabung dalam BN, namun tidak sebanding dengan perwakilan dari UMNO. Sementara itu, untuk posisi *Timbalan* PM lebih sering diisi oleh *Timbalan* Presiden UMNO pula. Kesepakatan ini telah berjalan dan disepakati oleh partai-partai yang tergabung dalam BN. Dari hal itu dapat dikatakan bahwa peran UMNO dalam pemerintahan sangat besar dikarenakan adanya kesepakatan bagi ras Melayu untuk mengatur pemerintahan.

Dengan adanya peran yang besar dari UMNO dalam pemerintahan, maka peristiwa-peristiwa politik dalam UMNO ikut berpengaruh terhadap stabilitas politik di Malaysia secara keseluruhan, terutama terhadap BN sebagai partai politik koalisi dimana UMNO merupakan partai utamanya. Terbentuknya BN setelah adanya peristiwa 13 Mei 1969 yang menjadikan Tunku Abdul Rahman mengundurkan diri sebagai Presiden UMNO dan digantikan oleh Tun Abdul Razak. Sejak diambilalih oleh Tun Abdul Razak, maka koalisi yang sebelumnya merupakan *Parti Perikatan* diperluas kerjasamanya menjadi BN, sehingga partai-partai politik yang tergabung di dalamnya menjadi 9 partai pada masa awal berdirinya.

Keefektifan BN sebagai partai politik koalisi melalui peran dari Tun Abdul Razak langsung diuji pada *pilihan raya* di tahun 1974. Pada *pilihan raya* ketika itu, melalui peran Tun Abdul Razak sebagai pengagas kerjasama BN, partai koalisi tersebut mampu meraih 135 dari 154 kursi yang diperebutkan untuk

¹⁰³ R. K. Vasil, *Politics In A Plural Society*, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1971), hlm. 5.

parlemen (104 di wilayah Semenanjung Malaysia, 16 di Sabah dan 15 di Sarawak), atau sebanyak 87 persen kursi berhasil diraih oleh BN.¹⁰⁴

Dominasi BN melalui Tun Abdul Razak sebagai Presiden UMNO telah menjadikan partai politik oposisi tidak mampu meraih suara yang baik.¹⁰⁵ Keseluruhan wilayah di Semenanjung Malaysia dikuasai oleh BN, terutama pada wilayah Kelantan, Perlis maupun Pahang tidak terdapat satu kursipun bagi partai politik oposisi.¹⁰⁶

Kerjasama koalisi BN terbukti efektif hingga kemudian BN kembali mampu meraih perolehan kursi sebanyak 4/5 untuk parlemen pada *pilihan raya* 1978, walaupun PAS memutuskan diri tidak lagi bergabung dengan BN.¹⁰⁷ Dengan adanya BN, maka partai-partai politik yang tergabung di dalamnya merupakan representasi dari beragam ras, suku dan agama di Malaysia.¹⁰⁸

Terbentuknya BN dapat dikatakan setelah terjadinya peristiwa 13 Mei 1969. Kerusuhan ras yang terjadi pada masa tersebut lebih dikarenakan adanya ketimpangan distribusi ekonomi antara ras Melayu dengan ras Cina. Melalui hal itu, sejak diciptakannya *Rukun Negara*, maka Tun Abdul Razak menggagas suatu Dasar Ekonomi Baru (DEB) untuk mendekatkan jarak pemisah secara ekonomi antara ras Melayu dengan ras Cina. DEB dihasilkan untuk lebih membantu segala ras di Malaysia, terutama ras Melayu secara ekonomi dengan mengurangi bagian investasi asing sehingga distribusi ekonomi yang berjalan lebih berorientasi lokal.

Agar DEB dapat tercapai, maka melalui BN, UMNO yang mendominasi pemerintahan menjalankan kebijakannya. Target yang ingin dicapai oleh DEB adalah, peningkatan terhadap kontrol dari ras Melayu dalam hal ekonomi yang hanya berjumlah 1,9 persen pada tahun 1970 menjadi paling tidak 30 persen di 20 tahun berikutnya. Sedangkan untuk ras non-Melayu sendiri, khususnya ras Cina

¹⁰⁴ Paridah Abd. Samad, *Op. Cit.*, hlm. 122.

¹⁰⁵ Pada *pilihan raya* tahun itu partai-partai politik oposisi yang ikut berkompetisi selain DAP diantaranya adalah *Malaysian People's Socialist Party* (PSRM), *Kesatuan Insaf Tanah Air* (KITA) dan *Party of Social Justice* (PEKEMAS).

¹⁰⁶ *Far Eastern Economic Review*, 26 Januari, 1976.

¹⁰⁷ PAS tidak lagi tergabung dengan BN dikarenakan PAS merupakan partai yang meraih suara dari ras Melayu, tentunya hal ini serupa dengan UMNO. UMNO yang merupakan partai utama dalam BN menjadikan kedua partai tersebut justru meraih suara dari ras yang sama sehingga di dalam BN yang terjadi adalah kompetisi diantaranya. Hal lain yang mendasari kemunduran PAS adalah, UMNO dianggap terlampaui mendominasi pembagian kursi, khususnya untuk kabinet yang dibentuk oleh PM.

¹⁰⁸ Paridah Abd. Samad, *Op. Cit.*, hlm. 124.

telah mengontrol 37,4 persen dan diharapkan naik menjadi paling tidak 40 persen, dimana untuk investor asing dicanangkan turun dari 60 persen menjadi 30 persen.¹⁰⁹

Dengan adanya DEB melalui peran Tun Abdul Razak sebagai Presiden UMNO serta UMNO yang bekerja sebagai mesin pemerintahan dengan menggunakan BN untuk mengawal kebijakannya, dapat dilihat bahwa peran UMNO dalam BN sangat besar dalam menentukan tidak hanya yang berkaitan dengan stabilitas politik, tetapi juga stabilitas ekonomi. UMNO sebagai suatu struktur politik telah memainkan peran utamanya, terutama dengan adanya posisi Presiden UMNO sebagai Presiden BN sehingga dapat dikatakan meski BN merupakan partai koalisi, namun UMNO merupakan partai utama yang menjalankan pemerintahan di dalam tubuh BN itu sendiri, dengan kata lain setiap kebijakan yang dihasilkan oleh BN merupakan representasi dari UMNO sebagai partai yang dominan.

2.3 Peran Elit Politik Dalam UMNO

UMNO yang merupakan struktur politik di Malaysia memiliki suatu tradisi politik dalam suksesi kepemimpinannya.¹¹⁰ Dalam hal ini, peran elit politik sangat dominan dalam suksesi kepemimpinan di UMNO, terutama peran dari Presiden UMNO maupun Timbalan Presiden yang menggantikan posisi presidennya tersebut. UMNO yang pada awalnya dipimpin oleh Dato' Onn Jaafar, kemudian digantikan oleh *Timbalannya* yaitu Tunku Abdul Rahman. Pergantian tersebut setelah adanya pengunduran diri Dato' Onn Jaafar dari kepemimpinan UMNO.

Pada 27 Agustus 1951 dalam pertemuan UMNO, Dato' Onn Jaafar yang merupakan Presiden UMNO mengusulkan agar PTM dapat meraih kemerdekaannya, diperlukan suatu kerjasama yang konstruktif antara ras-ras di

¹⁰⁹ Hng Hung Yong, *Op.Cit.*, hlm. 111.

¹¹⁰ Suksesi kepemimpinan secara luas merupakan cara dimana kekuasaan (kekuatan) politik diwariskan, atau ditransfer, dari suatu individu, pemerintahan atau rezim ke individu, pemerintahan atau rezim lainnya. Dalam pengertian sempit, suksesi kepemimpinan merujuk pada cara dimana berbagai rencana rapi dibuat untuk melakukan transfer kekuasaan sedemikian rupa, sehingga krisis legitimasi bersifat sementara dan tak terelakkan, dapat dikendalikan. Untuk lebih lengkapnya mengenai suksesi kepemimpinan dapat dilihat di buku Peter Calvert, *Proses Suksesi Politik*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1995).

Malaysia. Dari hal tersebut, ia mengaggas agar UMNO membuka keanggotaannya terhadap ras lain, sehingga UMNO tidak hanya merupakan partai politik yang mengutamakan kepentingan ras Melayu semata, tetapi juga ras Cina dan India. Usulan itu ditentang oleh sebagian besar anggota UMNO, sehingga Dato' Onn Jaafar harus mengundurkan diri dan kemudian mendirikan IMP pada 16 September 1951 bersama sebagian kecil anggota UMNO.¹¹¹

Demikian juga pada masa Tunku Abdul Rahman sebagai Presiden UMNO, Tun Abdul Razak merupakan *Timbalan Presidennya*. Tunku Abdul Rahman yang merupakan penggagas kerjasama awal koalisi antara UMNO dengan MCA, kemudian MIC melalui *Parti Perikatan* telah membuktikan pada masanya bahwa partai yang mampu mempertahankan unsur dari ras masing-masing terbukti lebih efektif dalam meraih suara dengan tetap mempertahankan identitasnya sendiri-sendiri. Karena adanya peristiwa 13 Mei 1969, Tunku Abdul Rahman harus mengundurkan diri setelah terjadinya peristiwa kerusuhan antara ras. Tunku Abdul Rahman dianggap gagal dalam mengatasi kerusuhan antara ras yang terjadi kala itu. Posisi Presiden UMNO pun beralih kepada Tun Abdul Razak di 22 September 1970 yang sebelumnya merupakan *Timbalan Presiden* UMNO.¹¹²

Tun Abdul Razak menduduki posisi Presiden UMNO setelah sebelumnya membentuk MAGERAN yang menghasilkan *Rukun Negara* untuk mencegah terulangnya kerusuhan ras pada 13 Mei 1969 itu. Tun Abdul Razak juga mengaggas DEB sebagai solusi dari permasalahan ekonomi terhadap ras Melayu. Di masa kepemimpinannya, Tun Hussein Onn merupakan *Timbalannya*. Hingga kemudian Tun Hussein Onn terpilih sebagai penggantinya dikarenakan Tun Abdul Razak wafat karena penyakit leukemia pada 14 Januari 1976.¹¹³

Setelah menjadi Presiden UMNO sekaligus PM Malaysia, pada 5 Maret 1976, Tun Hussein Onn menunjuk Mahathir Mohamad sebagai *Timbalannya*. Mahathir Mohamad yang sebelumnya menduduki posisi *Naib Presiden* UMNO¹¹⁴ dipilih diantara para kandidat lain yang juga menduduki posisi itu, yaitu Ghaffar Baba dan Tengku Razaleigh Hamzah. Kandidat lain di luar posisi *Naib Presiden*

¹¹¹ Chamil Wariya, *Naik...*, *Op. Cit.*, hlm. 8-9.

¹¹² Hng Hung Yong, *Op. Cit.*, hlm. 97.

¹¹³ Paridah Abd. Samad, *Op. Cit.*, hlm. 153.

¹¹⁴ *Naib Presiden* UMNO adalah posisi tertinggi ketiga dalam struktur kepemimpinan di UMNO. Untuk lebih lengkapnya fungsi dari *Naib Presiden* UMNO, dapat dilihat pada lampiran.

UMNO yang juga dianggap berpotensi sebagai *Timbalan Presiden* UMNO adalah Datuk Harun Idris dan Tun Patinggi Abdul Rahman. Dari semua nama-nama tersebut, Tun Hussein Onn memilih Mahathir Mohamad sebagai *Timbalannya*.¹¹⁵

Pada masa kepemimpinan Tun Hussein Onn, sebetulnya Tun Hussein Onn mewarisi konflik politik sejak masa Tun Abdul Razak. Konflik politik yang juga berasal dari dalam UMNO dipicu oleh konflik antara Tun Abdul Razak dengan Datuk Harun Idris.

Datuk Harun Idris merupakan seorang yang cukup dihormati, disegani serta memiliki pengaruh dalam UMNO. Datuk Harun Idris menduduki posisi sebagai Menteri Besar Selangor, bahkan juga dianggap sebagai calon Presiden UMNO di masa mendatang. Datuk Harun Idris telah mencalonkan dirinya dan kemudian terpilih sebagai Ketua Pemuda UMNO.¹¹⁶ Datuk Harun Idris yang populer di kalangan senior UMNO kemudian menggunakan Pemuda UMNO untuk meraih simpati dari kalangan junior UMNO, sehingga pengaruhnya di dalam UMNO menjadi cukup besar. Di masa itu, Datuk Harun Idris sering menggunakan Pemuda UMNO untuk mengkritik kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Tun Abdul Razak sebagai Presiden UMNO.

Tun Abdul Razak membaca sinyalemen ini sebagai adanya keinginan untuk mendirikan partai di dalam partai oleh Datuk Harun Idris. Perseteruan antara Tun Abdul Razak dengan Datuk Harun Idris menemui puncaknya pada pemilihan UMNO di bulan Agustus 1975. Pada pemilihan *Naib Presiden* UMNO, terdapat tiga orang kandidat yang ketiga-tiganya sudah pasti akan terpilih sebagai *Naib Presiden* UMNO, yaitu Ghaffar Baba, Tengku Razaleigh Hamzah serta Mahathir Mohamad. Akan tetapi, Datuk Harun Idris mengajukan diri sebagai salah satu calon dalam pemilihan itu. Melihat Datuk Harun Idris mencalonkan diri, Tun Abdul Razak pada pemilihan UMNO tersebut mengeluarkan pernyataan bahwa ia lebih memilih tiga kandidat yang sebelumnya telah mengajukan diri.

¹¹⁵ Paridah Abd. Samad, Op. Cit., hlm. 161.

¹¹⁶ Pemuda UMNO merupakan sayap politik dari UMNO yang berisi kalangan muda UMNO. Meski Datuk Harun Idris merupakan salah seorang senior UMNO, dimana usianya sebetulnya tidak tepat untuk menjadi Ketua Pemuda UMNO, namun pada masa itu tidak ada batasan umur untuk menjadi seorang Ketua Pemuda.

Hasil dari pemilihan UMNO kemudian, Datuk Harun Idris tidak terpilih sebagai *Naib Presiden* UMNO.¹¹⁷

Pada 24 November 1975, Datuk Harun Idris terkena tuduhan melakukan korupsi. Ketika kemudian Tun Abdul Razak wafat dan digantikan oleh Tun Hussein Onn, Datuk Harun Idris untuk kedua kalinya terkena tuduhan melakukan korupsi.¹¹⁸ Datuk Harun Idris dituduh telah melakukan korupsi pada tuduhan pertamanya dalam kasus *Hongkong Bank*. Ia dituduh telah merugikan negara sebanyak 250 ribu ringgit Malaysia dengan menggunakan pengaruhnya sebagai Menteri Besar Selangor. Sementara itu, tuduhan lainnya adalah ia dianggap telah merugikan negara dengan meminjam uang dari Bank Rakyat sebanyak 7,9 juta ringgit untuk menyelenggarakan kejuaraan dunia tinju antara Muhammad Ali berhadapan dengan Joe Bugner pada 1 Juli 1975. Bank Rakyat merupakan bank yang memberikan kredit ringan kepada para petani dan nelayan di Malaysia, dimana Datuk Harun Idris mengisi posisi komisarisnya. Pertandingan tersebut berjalan dengan lancar, meski tidak menghasilkan keuntungan. Datuk Harun Idris dikenai tuduhan adanya pemalsuan dokumen ketika mengajukan pinjaman kala itu.¹¹⁹

Datuk Harun Idris yang bersikeras tidak melakukan kesalahan menjadikan suhu politik di Malaysia memanas. Terlebih lagi ketika ia menolak untuk menjalankan vonis yang dijatuhkan kepadanya oleh pengadilan. Para pendukungnya pun ikut menjaga dirinya dan berkumpul di rumahnya sehingga dikhawatirkan aparat keamanan yang akan meringkusnya justru akan memicu bentrokan. Hingga kemudian, permasalahan Datuk Harun Idris yang didukung oleh Pemuda UMNO dapat diselesaikan dengan penyerahan dirinya kepada polisi pada 1 Maret 1978.¹²⁰ Dengan demikian, Tun Hussein Onn mampu menyelesaikan konflik politik yang terjadi dalam UMNO sejak masa Tun Abdul Razak.

Ketika kemudian Tun Hussein Onn mengundurkan diri karena alasan kesehatan dan digantikan oleh Mahathir Mohamad di tahun 1981, dalam tradisi

¹¹⁷ Chamil Wariya, *UMNO...*, *Op. Cit.*, hlm. 13.

¹¹⁸ Paridah Abd. Samad, *Op. Cit.*, hlm. 160.

¹¹⁹ Hng Hung Yong, *Op. Cit.*, hlm. 121.

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 131.

suksesinya kepemimpinan sejak UMNO berdiri, tidak pernah terjadi konflik yang bertujuan untuk merebut kekuasaan presidennya. UMNO telah memiliki mekanismenya melalui terpilihnya seorang *timbangan presiden* sebagai presiden berikutnya.

